

**ANALISIS DAMPAK BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN
PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA**
***THE IMPACT OF GOVERNMENT SHOPPING ON POVERTY ON AUTONOMY
REGIONAL ERA IN INDONESIA***

Zainuddin¹, T. Makmur², dan Isthafan Najmi³

¹) Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

²) Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala

³) Fakultas Ekonomi Universitas Abulyatama

email: Zainuddin.usm08@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja ekonomi (BEK) dan belanja pendidikan (BPD) menurut provinsi terhadap kemiskinan pada era otonomi daerah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia dan Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia periode 2012 hingga 2015. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan model analisis data panel, yaitu menggunakan *fixed effect model*. Berdasarkan hasil estimasi didapat bahwa variabel belanja ekonomi dan belanja pendidikan secara bersama-sama signifikan terhadap kemiskinan, sedang secara parsial variabel belanja ekonomi menurut provinsi berpengaruh terhadap kemiskinan pada era otonomi daerah di Indonesia, dan variabel belanja pendidikan menurut provinsi tidak berpengaruh.

Kata Kunci: kemiskinan, belanja ekonomi, belanja pendidikan, dan otonomi daerah

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the influence of economic spending (BEK) and education spending (BPD) by province on poverty in the era of regional autonomy in Indonesia. Data were collected through the publication of the Indonesian Central Bureau of Statistics and the Director General of Fiscal Balance of the Indonesian Ministry of Finance for the period of 2012 to 2015. The analysis in this study was conducted using panel data analysis model, using fixed effect model. Based on the estimation result, it found that the variables of economic expenditure and education expenditures are together with poverty, while the partial variable of economic expenditure by province is to poverty in the era of regional autonomy in Indonesia, and the variable of education expenditure by province is no effect.

Keywords: *poverty, economic expenditure, education expenditure, and regional autonomy*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukan otonomi daerah pada tahun 2001 yang ditandai dengan diperkuatnya otonomi luas pada tahun 2004, dimana pemerintah daerah diberikan keleluasaan yang luas dalam bidang penetapan besarnya anggaran belanja untuk mencapai suatu hasil yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat atau terangkatnya masyarakat dari kemiskinan di wilayah masing-masing. Desentralisasi fiskal adalah mengalihkan tanggung jawab pengeluaran pemerintah pusat kepada pemerintah lokal atau sub-nasional, seperti untuk memenuhi kebutuhan penduduk lokal, dan alokasi sumber daya menjadi lebih efisien (Jia, Guo, and Zhang 2014). Namun, setelah 15 tahun pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal diberlakukan terlihat angka kemiskinan di setiap provinsi di Indonesia masih tinggi. Dimana, secara rata-rata persentase kemiskinan terhadap total penduduk menurut provinsi pada tahun 2015 untuk semua provinsi di Indonesia berada pada posisi 11.88% (BPS RI 2015).

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal yang dituangkan pada kewenangan pemerintah daerah (sub nasional) sebenarnya dapat menurunkan kemiskinan. Belanja ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Ethiopia (Ababa 2009) Asghar, Hussain, and Rehman (2012) bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, hukum dan ketertiban secara signifikan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di Pakistan. Kemudian, Dahmardeh and Tabar (2013) menyatakan bahwa pengeluaran yang konstruktif berpengaruh positif pada pengurangan kemiskinan di Sistan dan

Baluchestan Iran.

Selanjutnya, program penyediaan asuransi kesehatan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Amerika Serikat (Sommers and Oellerich 2013). Dan belanja perumahan sangat membantu orang miskin di Kolombia (Gilbert 2014). Paddu (2015) menyatakan bahwa peningkatan porsi (rasio) total pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan terhadap total pendapatan provinsi secara signifikan mempengaruhi kemiskinan di wilayah timur Indonesia. Kemudian, Omari and Muturi (2016) pengeluaran pertanian dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan belanja pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kenya. Belanja ekonomi pada bidang pertanian dapat menurunkan kemiskinan (Johnson, Kovarik, and Meinzen-dick 2016). Distribusi pendapatan dan pendidikan penting untuk memerangi intensitas kemiskinan (Marinho, Campelo, and Araujo 2017). Era desentralisasi juga dapat menciptakan keadaan yang efisien pada tingkat pemerintah daerah di Rusia (Yushkov (2015). Di Indonesia, pengentasan kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pemerintahan, artinya sistem pemerintahan yang sentralistik dan sistem pemerintahan yang desentralistik, maka pemerintah pusat melahirkan suatu kebijakan, yaitu kebijakan desentralisasi fiskal yang luas kepada pemerintah dibawahnya. Namun, besarnya anggaran belanja sektoral di setiap provinsi belum mampu menciptakan keadaan kemiskinan berada pada posisi yang ideal. Berdasarkan sebelumnya, maka tujuannya adalah untuk menguji pengaruh belanja sektor ekonomi dan belanja sektor

pendidikan menurut provinsi terhadap kemiskinan pada otonomi daerah fiskal di Indonesia.

Kemiskinan ada dua katagori, yaitu (1) kemiskinan absolute adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (Todoro dan Smith, 2006; Vijayakumar dan Olga 2012; Boyle dan Boyle 2015; dan Bratanova et al. 2016), dan (2) Kemiskinan relatif adalah sejumlah penduduk memiliki sumber daya yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya, namun ada yang kurang dibandingkan dengan yang lain (Boyle dan Boyle 2015; dan Bratanova et al. 2016). Sebagai contoh dari kemiskinan relatif adalah upah pekerja industri yang minimum, seperti yang dinyatakan oleh Manning (2008) dan Saari et al. (2016) bahwa upah minimum bisa mengangkat orang atau rumah tangga etnik pekerja formal dan informal untuk mengurangi sedikit kemiskinan dengan

kata lain akan terangkat dari kemiskinan absolut ke relatif.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS (Badan Pusat Statistik) Republik Indonesia menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Dimana, GK adalah garis kemiskinan, GKM adalah garis kemiskinan makanan, dan GKNM adalah garis kemiskinan non makanan. Dalam analisis ini, kemiskinan (MIS) dapat diukur dengan formula sebagai berikut:

$$MIS = \frac{\text{Total Penduduk miskin menurut provinsi}}{\text{Total penduduk menurut provinsi}}$$

Kebijakan desentralisasi fiskal dapat menciptakan efisiensi di tingkat subnasional atau provinsi, karena pemerintah di bawahnya atau pemerintah di tingkat subnasional lebih memahami tentang kebutuhannya dan lebih berpengalaman dalam pengadaan barang-barang publik dengan *cost* yang rendah (Martinez-vazquez & McNab 2003; dan Yushkov 2015). Sejalan dengan pendapat Neyapti (2010) bahwa dengan desentralisasi fiskal akan lebih efisien dalam pengeluaran karena pemerintah lokal lebih memahami preferensi lokal. Tujuan utama dari desentralisasi fiskal

adalah untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah lokal dalam membangun infrastruktur sosial (barang publik), dengan fungsi utamanya agar tidak melebar kesenjangan spasial dalam pembangunan infrastruktur sosial (Kalirajan 2012). Dan sebagai bahan masukan kepada pemerintah provinsi dalam menyusun anggaran belanjanya.

Jadi, desentralisasi fiskal adalah mengalihkan tanggung jawab pengeluaran pemerintah pusat kepada pemerintah lokal atau sub-nasional, seperti untuk memenuhi kebutuhan penduduk lokal, dan alokasi sumber daya menjadi lebih efisien (Jia et

al. 2014) dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan memproduksi barang publik dan pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (Kumari 2016). Desentralisasi fiskal akan terjadi alokasi sumber daya yang lebih baik dan lebih produktif karena wilayahnya yang kecil (Xie & Davoodi 1999; dan Thornton & Thornton 2007). Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan transfer fiskal, pemberian kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat (nasional) kepada pemerintah daerah (Vo 2009).

Desentralisasi fiskal bisa dilihat sebagai total pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Jin & Zou (2005) dan Jia et al. (2014) bahwa desentralisasi fiskal dapat dilihat dari total belanja pemerintah lokal atau daerah. Desentralisasi fiskal juga diukur sebagai kemampuan dalam mengatur pengumpulan pajak dan pengeluaran atau belanja pemerintah daerah (Noor 2012:38). Belanja urusan atau sektoral pemerintah provinsi pada era desentralisasi fiskal adalah sesuai dengan skema dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 ada sembilan urusan atau sektoral, yaitu belanja pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup,

perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan soial. Namun, dalam kajian ini yang dianggap sangat berkaitan dengan kemiskinan adalah (1) Belanja ekonomi (BEK), yaitu diproksikan sebagai belanja ekonomi perkapita menurut provinsi, dan (2) belanja pendidikan (BPD), yaitu diproksikan sebagai belanja pendidikan perkapita menurut provinsi.

Belanja pemerintah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang memiliki hubungan dengan kemiskinan (Mehmood & Sadiq 2010). Kebijakan belanja ekonomi bidang transportasi member efek pada kemiskinan (Sanchez 2008). Ababa (2009) menyatakan perbaikan kualitas jalan dan peningkatan akses terhadap layanan penyuluhan pertanian menyebabkan pertumbuhan konsumsi lebih cepat dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah di daerah pedesaan. Pengembangan proyek pertanian dapat meningkatkan pendapatan perempuan dan menurunkan kemiskinan (Johnson et al. 2016). Belanja ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan secara langsung melalui efek ketenagakerjaan dan secara tidak langsung melalui hubungan investasi dan konsumsi dengan sektor pertanian dan non pertanian skala kecil (Broeck and Maertens 2017). Pengukuran belanja ekonomi (BEK) dapat dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$BEK = \frac{\text{Total belanja ekonomi per tahun menurut provinsi}}{\text{Total penduduk menurut provinsi}}$$

Belanja pendidikan (BPD) adalah seluruh belanja yang dikeluarkan untuk infrastruktur pendidikan termasuk pengadaan tenaga kependidikan, bidang pemuda dan olah raga, dan lain sebagainya.

Belanja ini memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan, seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Cremin and Goretti (2012) bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat

dicapai tanpa ada pembangunan manusia. Kemudian, Belanja pendidikan sekolah dasar lebih berpihak kepada orang miskin secara *absolute* (Amakom 2012). Paddu (2015) menyatakan bahwa peningkatan porsi (rasio) total pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan terhadap total pendapatan provinsi secara signifikan

mempengaruhi kemiskinan. Selanjutnya, bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki efek jangka panjang yang positif terhadap akumulasi modal manusia (Dissou, Didic, and Yakautsava 2016). Pengukuran belanja pendidikan (BPD) dapat dilakukan dengan formula sebagai berikut

$$BPD = \frac{\text{Total belanja pendidikan per tahun menurut provinsi}}{\text{Total penduduk menurut provinsi}}$$

Total penduduk menurut provinsi

METODE

Objek penelitian adalah 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel yakni menggabungkan data *time series* dan *cross section* pada 33 provinsi. Fokus penelitian pada kemiskinan yang diukur dengan jumlah penduduk miskin setiap provinsi dari tahun 2012 sampai dengan 2015. Definisi dan operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas, variabel terikat adalah Kemiskinan (MIS), yaitu jumlah penduduk miskin per provinsi setiap periode observasi. Sedangkan, variabel bebas adalah (1) Belanja ekonomi (DJK, 2015), yaitu belanja ekonomi dibagi dengan jumlah penduduk per provinsi dari setiap periode observasi, dan (2) Belanja pendidikan (DJK, 2015), yaitu belanja pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk per provinsi setiap periode observasi.

Menurut Green (2012) dan (Feng et al. 2017) bahwa secara umum regresi *pooled model* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X'_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

dimana, $i = 1, \dots, n$, dan $t = 1, \dots,$

dengan demikian dapat diformulasikan

model analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$MIS_{it} = \beta_0 + \beta_1 BEK_{it} + \beta_2 BPD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana, MIS_{it} adalah jumlah penduduk miskin per provinsi, BEK_{it} adalah belanja ekonomi rata-rata per provinsi, dan BPD_{it} adalah belanja fungsi pendidikan, i adalah *Cross section* ($i = 1, \dots, N$), t adalah *Time series* ($t = 1, \dots, T$), β_0 adalah konstanta, β_1 , dan β_2 adalah koefisien atau parameter yang ditaksir, dan ε_{it} adalah error.

Untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yaitu pemilihan antara model efek tetap (*fixed effect model*) dengan model koefisien tetap (*common effect model*) bisa dilakukan dengan uji Chow. Dimana, jika nilai $F_{hitung} > F_{(n-1, nT-n-K)}$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $\rho - value < \alpha$ (taraf signifikansi atau alpha), maka model terpilih adalah model efek tetap (*fixed effect model*). Sebaliknya. Jika $\rho - value < \alpha$ (taraf signifikansi atau alpha), maka model terpilih adalah *common effect model*. Selanjutnya, uji Hausman dilakukan untuk memilih model *fixed effect model* dan *random effect model*. atau $\rho - value > \alpha$ (taraf signifikansi atau alpha), maka model terpilih adalah *random*

effect model. Sebaliknya, jika $\rho - value < \alpha$ (taraf signifikansi atau alpha), maka model terpilih adalah *fixed effect model*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji Chow seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	677.716341	(32,97)	0.0000

Berdasarkan diatas didapat nilai Prob. cross-section F sebesar 0.0000, maka dapat dinyatakan bahwa lebih kecil dari nilai kritis 0.05 ($0.0000 < 0.05$). Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa *fixed effect model* lebih baik digunakan dibandingkan dengan *common effect model*. Hasil uji Hausman seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.545723	2	0.0031

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat nilai *prob. cross-section random* sebesar 0.0031 adalah lebih kecil dari nilai kritis 0.05 ($0.0031 < 0.05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* lebih baik

digunakan dibandingkan dengan *random effect model*. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji chow dan uji Hausman didapat bahwa model analisis terbaik untuk penelitian ini adalah *fixed effect model*.

Estimasi dengan *fixed effect model*, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Estimasi dengan *fixed effect model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.06224	0.958203	20.93735	0.0000
LOG(BEK)	-0.617836	0.081647	-7.567187	0.0000
LOG(BPD)	0.013853	0.075487	0.183509	0.8547

Nilai R-squared = 0.347083 F-statistic = 34.28741 Prob(F-statistic = 0.0000

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat bahwa Belanja Ekonomi (BEK) dan Belanja Pendidikan (BPD) secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap

kemiskinan pada era otonomi daerah di Indonesia atau dapat dinyatakan bahwa pengaruhnya sangat kuat. Variabel Belanja Ekonomi (BEK) berpengaruh dan

signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan belanja pendidikan tidak signifikan terhadap kemiskinan pada era otonomi daerah di Indonesia, hal ini disebabkan beberapa faktor karena masih ada program dan kegiatan yang belum tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil estimasi dengan fixed effect model sebelumnya, maka secara bersama-sama variabel Belanja Ekonomi (BEK) dan Belanja Pendidikan (BPD) berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan, secara parsial variabel Belanja Ekonomi (BEK) memiliki pengaruh yang kuat dalam rangka pengentasan kemiskinan pada era otonomi daerah di Indonesia. Besar pengaruh BEK terhadap kemiskinan adalah 61.78% . Namun, variabel belanja pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Kemampuan variabel Belanja Ekonomi (BEK) dan Belanja Pendidikan (BPD) dalam mempengaruhi variabel kemiskinan adalah sebesar 34.71%. Dengan demikian, dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia hendaknya ditingkatkan belanja ekonomi menurut provinsi yang efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) bahwa variabel Belanja Ekonomi (BEK) dan Belanja Pendidikan (BPD) menurut provinsi secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan pada era otonomi daerah di Indonesia, (2) Variabel Belanja Ekonomi (BEK) berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan pada era otonomi daerah di Indonesia, (3) Variabel Belanja Pendidikan (BPD) tidak signifikan

terhadap kemiskinan pada era otonomi daerah di Indonesia, dan (3) Kemampuan variabel Belanja Ekonomi (BEK) dan Belanja Pendidikan (BPD) dalam mempengaruhi variabel kemiskinan sebesar 34.71% dan sisanya sebesar 65.29% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababa, Addis. 2009. The Impact of Agricultural Extension and Roads on Poverty and Consumption Growth in Fifteen Ethiopian Villages 91 (November): 1007–21. doi:10.1111/j.1467-8276.2009.01325.x
- Amakom, Uzochukwu. 2012. Public Expenditure on Education and Healthcare in Nigeria: Who Benefits and Why? 7 (12): 48–59. doi:10.5539/ijbm.v7n12p48.
- Asghar, Nabeela, Zakir Hussain, and Hafeez Ur Rehman. 2012. The Impact of Government Spending on Poverty Reduction: Evidence from Pakistan 1972 to 2008 6 (3): 845–53. doi:10.5897/AJBM11.922.
- Broeck, Goedele Van Den, and Miet Maertens. 2017. Moving Up or Moving Out? Insights into Rural Development and Poverty Reduction in Senegal. World Development 99. Elsevier Ltd: 95–109. doi:10.1016/j.worlddev.2017.07.009.
- Boyle, E.J.O. & Boyle, E.J.O. 2015. Review of Social Economy Toward an Improved Definition

- of Poverty Toward an Improved Definition of Poverty, 6764(November).
- Bratanova, B. et al., 2016. Poverty, inequality, and increased consumption of high calorie food: Experimental evidence for a causal link. *Appetite*, 100, pp.162–171. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2016.01.028>.
- Cremin, Peadar, and Mary Goretti. 2012. *International Journal of Educational Development Education, Development and Poverty Reduction: A Literature Critique* § 32. Elsevier Ltd: 499–506. doi:10.1016/j.ijedudev.2012.02.015.
- Dahmardeh, Nazar, and Mahmoud Hashemi Tabar. 2013. Government Expenditures and Its Impact on Poverty Reduction (Empirical From Sistan and Baluchestan Province of Iran), 2 (1): 251–60
- Dissou, Yazid, Selma Didic, and Tatsiana Yakautsava. 2016. Government Spending on Education , Human Capital Accumulation, and Growth, *Economic Modelling* 58. Elsevier B.V.: 9–21. doi:10.1016/j.econmod.2016.04.015.
- Feng, Guohua, Jiti Gao, Bin Peng, and Xiaohui Zhang. 2017. A Varying-Coefficient Panel Data Model with Fixed Effects: Theory and an Application to US Commercial Banks, 196. Elsevier B.V.: 68–82. doi:10.1016/j.jeconom.2016.09.011
- Gilbert, Alan G. 2014. Free Housing for the Poor: An Effective Way to Address Poverty? *Habitat International* 41. Elsevier Ltd: 253–61. doi:10.1016/j.habitatint.2013.08.009.
- Green, W. H. 2012. *Econometric Analysis. Seventh Edition*. New York: Pearson Education, Inc.
- Johnson, Nancy L, Chiara Kovarik, and Ruth Meinzen-dick. 2016. Gender , Assets , and Agricultural Development: Lessons from Eight Projects. *World Development* xx. Elsevier Ltd. doi:10.1016/j.worlddev.2016.01.009.
- Jia, J., Guo, Q. & Zhang, J. 2014. China Economic Review Fiscal decentralization and local expenditure policy in China. *China Economic Review*, 28, pp.107–122. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.chieco.2014.01.002>.
- Jin, J. & Zou, H. 2005. Fiscal decentralization , revenue and expenditure assignments , and growth in China, 16, pp.1047–1064.
- Kalirajan, K. 2012. Fiscal Decentralization and Development Outcomes in India: An Exploratory Analysis. *World Development*, 40(8), pp.1511–1521. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.005>.

- Kumari, R. 2016. Impact of Fiscal Decentralization on Policy of Local Government. *International Journal of Advanced Research* , 1013 - 1014.
- Manning, Chris. 2008. Minimum Wages and Poverty in a Developing Country : Simulations from Indonesia's Household Survey, 36 (5): 916–33. doi:10.1016/j.worlddev.2007.05.012.
- Marinho, Emerson, Guaracyane Campelo, and Jair Araujo. 2017. Impact of Infrastructure Expenses in Strategic Sectors for Brazilian Poverty, 1–17. doi:10.1016/j.econ.2017.01.002.
- Martinez-vazquez, J. & McNab, R.M. 2003. Fiscal Decentralization and Economic Growth. , 31(9), pp.1597–1616.
- Mehmood, Rashid, and Sara Sadiq. 2010. The Relationship between Government Expenditure and Poverty : A Cointegration Analysis, 1 (1): 29–37.
- Noor, M. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta: Interpena.
- Neyapti, B. 2010. Fiscal decentralization and deficits: International evidence. *European Journal of Political Economy*, 26(2), pp.155–166.
- Omari, Loyce V, and Willy Muturi. 2016. The Effect of Government Sectoral Expenditure on Poverty Level in Kenya, 16 (2).
- Paddu, Abd Hamid. 2015. Contribution Of Fiscal Decentralization To Poverty Reduction In Eastern Indonesia, 17 (12): 53–60. doi:10.9790/487X-171235360.
- Saari, M Yusof, M Affan Abdul, Azman Hassan, and Muzafar Shah. 2016. Estimating the Impact of Minimum Wages on Poverty across Ethnic Groups in Malaysia, *Economic Modelling* 54. The Authors: 490–502. doi:10.1016/j.econmod.2016.01.028.
- Sanchez, Thomas W. 2008. Poverty, Policy, and Public Transportation, 42: 833–41. doi:10.1016/j.tra.2008.01.011.
- Sommers, Benjamin D, and Donald Oellerich. 2013. The Poverty-Reducing Effect of Medicaid, *Journal of Health Economics*, 32 (5). Elsevier B.V.: 816–32. doi:10.1016/j.jhealeco.2013.06.005.
- Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi; Edisi Kesembilan; Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Thornton, J. & Thornton, J. 2007. Fiscal decentralization and economic growth reconsidered.
- Undang-Undang Nomor 22. 1999. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25. 1999. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33. 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah*.

Undang-Undang Nomor 32., 2014.
Tentang Pemerintah Daerah

Vijayakumar, S. and Olga, B. 2012.
Poverty Incidence and its
Determinants in the Estate
Sector of Sri Lanka. , 4(1), pp.44–
55.

Vo, D.H. 2009. The Economics of Fiscal
Decentralization, 24(4), pp.657–
679.

www.bps.go.id

www.djpk.go.id

Xie, D. and Davoodi, H., 1999. Fiscal
Decentralization and Economic
Growth in the United States,
239, pp.228–239.

Yushkov, A., 2015. Fiscal decentralization
and regional economic growth:
Theory, empirics, and the
Russian experience. Russian
Journal of Economics, 1(2015),
pp.404–418. Available at:
www.rujec.org.